

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun, mengelola dan melaksanakan kebijakan serta keuangan daerahnya sendiri (Sujarweni, 2015) dalam Antari dan Sedana (2018). Diterapkannya kebijakan otonomi daerah disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengurus keseluruhan pembangunan daerah, oleh karena itu pemerintah pusat melimpahkan wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dengan mandiri seluruh kepentingan daerahnya (*Rosemarry et al*, 2016). Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa setiap pemerintah daerah diberi kesempatan dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

Sejalan dengan undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah memiliki penghasilan yang cukup, memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif

didalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Diterapkannya kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah memerlukan ukuran penilaian yang lebih kompleks karena variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat diukur dengan menggunakan satu variabel (Mahsun dkk, 2007).

Menurut Sari (2016), Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan terhadap APBD. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah penting dilakukan mengingat pengaruhnya sangat besar terhadap sektor publik. Pengukuran kinerja keuangan juga dipergunakan sebagai cerminan dalam penilaian akuntabilitas serta kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam menjalankan roda pemerintahan daerahnya kepada masyarakat guna tercapainya asas transparansi dari pelaporan tersebut masyarakat dapat menilai bagaimana

kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya apakah sesuai dengan pendapatan yang diterima dan apakah pengalokasiannya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (Aziz, 2016).

Pemerintah daerah ataupun provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai wewenang penuh untuk meningkatkan dan memajukan wilayahnya berdasarkan pendanaan dan penghasilan dari pendapatan daerah dalam meningkatkan APBD. Kemakmuran suatu negara atau daerah ditentukan dengan besarnya nilai tambah yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah, infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD dan *intergovernmental revenue* juga menambah belanja modal pemerintah daerah tersebut (Simanulang, 2013).

Intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat. (Sumarjo, 2010). *Intergovernmental revenue* disebut juga sebagai dana perimbangan. Dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan serta mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Selanjutnya dana perimbangan ditujukan untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah (Sari, 2016).

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja merupakan bagian dari pengeluaran daerah,

dimana pengeluaran tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung meliputi belanja pegawai barang dan jasa, belanja modal. Sedangkan Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan pemerintah desa.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah meliputi penerimaan dan belanja daerah melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Azhar, 2008). Pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya pada suatu pemerintah daerah, maka bisa disimpulkan bahwa daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan potensi daerahnya serta mencerminkan kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Ekonomi yang stabil tersebut mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik dan mandiri.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Ukuran keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal adalah mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan belanja modal semestinya tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya (Halim, 2014).

Menurut Mardiasmo (2009), langkah-langkah pengukuran kinerja yaitu pengukuran ekonomi, pengukuran efisiensi, dan pengukuran efektivitas. Pengukuran ekonomi (rasio ekonomis) yaitu rasio yang menggambarkan pemerintah daerah dalam merealisasikan pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran pengeluaran berdasarkan laporan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi (rasio efisiensi) yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pengeluaran dibandingkan dengan kemampuan dalam merealisasikan pendapatan berdasarkan laporan realisasi anggaran. Pengukuran efektivitas (rasio efektivitas) yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian dari Asmaul Aziz (2016) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Im Nur Aminah, Nunuy Nur Afifah, dan Arie Pratama (2019) menganalisis pengaruh *size*, *wealth*, *intergovernmental revenue*, dan belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size*,

wealth, intergovernmental revenue, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016) dengan judul pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, temuan audit dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Nur Ade Noviyanti dan Kiswanto (2016) menguji tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni (2019) meneliti pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagas Panji Sedana (2018) dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga penelitian ini sangat menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Asmaul Aziz (2016) dengan menambahkan dua variabel independen yaitu pendapatan asli

daerah dan belanja modal dengan judul **PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menambah referensi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi topik utama penelitian untuk melakukan penelitian. Dengan adanya latar belakang tersebut, kemudian muncul beberapa rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini membahas teori yang ada serta penjabaran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, juga akan dijabarkan mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi informasi tentang subjek penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan dan pembahasan atas hasil analisis data.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini berisi tentang simpulan berupa poin-poin yang berisi penelitian serta menjawab hipotesis penelitian dan hasil tambahan lainnya, selanjutnya berisi saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian dan juga untuk penelitian selanjutnya.